

Apa yang dapat dilakukan sekolah ?

- Meningkatkan peran serta masyarakat dengan membangun kerjasama antara sekolah, orangtua dan perusahaan lokal;
- Mengelola dana BOS secara transparan dan akuntabel melalui partisipasi masyarakat, guru dan siswa;
- Membuat rencana sekolah berdasarkan kepentingan sekolah dan data yang berkualitas;
- Mengoptimalkan berbagai kelompok kerja (untuk guru, kepala sekolah, pengawas) sebagai forum untuk berbagi praktik yang baik di tingkat sekolah, untuk pemecahan masalah, dan saling membelajarkan;
- Senantiasa mendorong inovasi dan kreativitas pada semua jenjang pendidikan;
- Ciptakan lingkungan yang membolehkan terjadinya kesalahan. Yang penting adalah belajar dari kesalahan yang dibuat;
- Mendorong siswa untuk mengembangkan keterampilan berpikir dan pemecahan masalah.



Foto: DBE 3 - USAID

Pelajaran IPA aktif dan menyenangkan di SMP 11 Binjai

Otonomi dan Akuntabilitas Sekolah di Bogor

Acep Kurniawan, kepala komite sekolah, SDN Cibuluh I, Bogor "Kami sangat bangga bahwa komite sekolah kami terlibat dengan sungguh-sungguh dalam proses pembuatan keputusan di sekolah. Pada saat kami membentuk komite ini, kami benar-benar melibatkan setiap orang dari masing-masing kelas, dari masyarakat, dan bahkan dari media. Setiap kelas kemudian menyerahkan calon mereka, yang kemudian mengikuti semacam ujian kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) informal untuk memastikan bahwa mereka benar-benar mempunyai komitmen dan mau bekerja tanpa dibayar. Para anggota komite sekolah kemudian dipilih dan mereka harus bekerja sangat erat dengan kepala sekolah. Mutual diperlukan komunikasi terbuka.

Belum lama ini, Komite Sekolah sangat prihatin dengan kurangnya infrastruktur sekolah. Kami mencoba melakukan dengar pendapat dengan para wakil DPRD, namun kami tidak memperoleh dukungan yang diharapkan. Jadi kami melihat kedalam, berbicara dengan para orangtua dan masyarakat. Dan kami mendapatkan dukungan yang luar biasa. Kami bekerja dengan sekolah untuk menunjukkan kepada setiap orang bahwa kami perlu ruang-ruang baru dan sebuah laboratorium. Melalui konsultasi yang intensif, orang tua memberikan semua yang kami perlukan dalam batas kemampuan mereka. Akhirnya, kami berhasil membangun infrastruktur dan fasilitas



Foto: DBE 1 - USAID

Pemilihan komite sekolah

yang lebih baik di sekolah tanpa bantuan dari luar.

Media sangat gemar menyoroti sekolah yang memungut biaya dari orangtua, tetapi kami menegaskan bahwa itu tidak terjadi di sekolah kami. Kami tetap pada prinsip kami, dan dukungan penuh kami dapat dari seluruh sekolah, masyarakat dan orang tua. Kami membela sekolah dan kepala sekolah, meskipun kadang-kadang kritik masih tetap kita sampaikan jika diperlukan."

Untuk cuplikan video tentang SDN Cibuluh 1, kunjungi www.worldbank.org/id/pendidikan. Bank Dunia mendukung Program BOS melalui BOS-KITA dengan dana tambahan dari Pemerintah Kerajaan Belanda.

Peran Provinsi dalam Mendukung MBS di Aceh

Pemerintah provinsi Aceh membentuk tim koordinasi pendidikan sebagai tindak lanjut dari dukungan program dari AusAID, USAID, UNICEF dan Save the Children. Tim ini bertanggungjawab atas perbaikan sektor pendidikan, termasuk kualitas guru, dan pemerintah daerah sekarang sedang mempertimbangkan dibentuknya sekretariat khusus untuk MBS. Inisiatif seperti ini penting dalam konteks otonomi khusus di Aceh,

yang memberikan peran penting bagi provinsi serta dalam konteks desentralisasi, karena kabupaten/kota juga bersifat otonom walaupun masih memerlukan dukungan dan arahan. Telah ada peningkatan dalam beberapa hal, salah satunya adalah menurunnya angka 'drop-out' secara drastis, sehingga provinsi dan kabupaten/kota yakin bahwa mereka ada di jalur yang benar.

KABAR PENDIDIKAN

EDISI 4
OKTOBER 2011

Dalam Edisi ini:

Bukti Internasional terkait MBS, Desentralisasi dan Hasil Pembelajaran Siswa

Pak Fasli, Wakil Menteri Pendidikan Nasional tentang Manajemen Berbasis Sekolah

Rekomendasi untuk Mendorong MBS

Berita Seminar dan Lokakarya Dialog Pendidikan Tematis

Informasi Praktik yang Baik di Situs Web

Mengelola Sekolah Demi Hasil Capaian Siswa yang Lebih Baik di Gorontalo

Di luar Bantuan Proyek untuk SBM di Banten

Partisipasi Masyarakat di Kupang

Apa yang Dapat Dilakukan Sekolah?

Otonomi dan Akuntabilitas Sekolah di Bogor

Peran Provinsi dalam Mendukung MBS di Aceh

Menjadikan Manajemen Berbasis Sekolah Efektif

Bukti internasional terkait MBS, Desentralisasi dan Hasil Pembelajaran Siswa

Ian Whitman, Kepala Program Kerjasama dengan Negara-negara Maju Non-Anggota, Direktorat Pendidikan, OECD, mempresentasikan hasil *Program for International Student Assessment 2009* (PISA) yang membandingkan berbagai negara perihal seperangkat indikator terkait dengan manajemen berbasis sekolah. Presentasi ini dimaksudkan untuk menggarisbawahi perlunya Indonesia mempertimbangkan penganalisaan hasil PISA terkait informasi kepada para pembuat kebijakan dalam bidang kurikulum

nasional, ujian nasional, serta pelatihan guru dan kepala sekolah. Presentasi tersebut menunjukkan bahwa kinerja Indonesia meningkat, meskipun dari dasar yang rendah; dengan demikian Indonesia perlu melakukan konsolidasi untuk mendukung manajemen berbasis sekolah, serta mendorong otonomi dan akuntabilitas di tingkat sekolah, agar kemajuan hasil pembelajaran siswa bisa terlihat.



Foto: Yogi Herdani

Mae Chu Chang, Bank Dunia, Wakil Menteri Fasli Jalal, Ian Whitman, OECD

Wakil Menteri Pendidikan Nasional, Fasli Jalal, bertindak sebagai pemimpin dalam forum ini. Beberapa pejabat tinggi pemerintah juga hadir, termasuk Direktur Jenderal dari Kemdiknas dan Kemenag, rektor universitas keguruan, staf Menteri Dalam Negeri, dan perwakilan dari mitra pembangunan.

Presentasi dilanjutkan dengan diskusi sekitar penguatan para pelaku dalam sistem pendidikan, terutama pada tingkat sekolah agar mereka dapat meningkatkan kinerja dalam sistem tersebut sehingga hasil PISA di Indonesia dan hasil ujian standar internasional lainnya dapat meningkat juga.

Pak Fasli, Wakil Menteri Pendidikan Nasional tentang Manajemen Berbasis Sekolah

Manajemen berbasis sekolah dikembangkan sebelum tahun 1998 di Indonesia; tetapi mengalami kesulitan dana pada saat Krisis Ekonomi Asia menerpa Indonesia; yang tertinggal untuk kepala sekolah hanyalah bangunan sekolah dan para guru, yang menerima gaji dari Pemerintah. Kepala sekolah tidak mempunyai sumber dana untuk biaya operasional. Program Jaring Pengaman Sosial mulai memberikan hibah sekolah serta beasiswa untuk siswa miskin, dengan tujuan agar siswa tidak keluar sekolah. Undang-undang pendidikan No 20/Tahun 2003 meletakkan dasar bagi manajemen berbasis sekolah, dan mitra pembangunanpun mulai memberikan bantuan terhadap pendekatan ini melalui beberapa program. Sekarang saatnya

untuk melakukan konsolidasi dan memastikan bahwa MBS bisa berkelanjutan, pelajaran dipetik dan peta jalan dikembangkan. Kita perlu mengintegrasikan ketiga pilar MBS yang terdiri dari Manajemen Sekolah, Peran Serta Masyarakat, dan Pembelajaran serta memastikan bahwa semua pelaku mengetahui peran mereka masing-masing.



BANK DUNIA INDONESIA

Gedung Bursa Efek Indonesia,

Lantai 12, Menara 2

Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53

Jakarta 12190

www.worldbank.org/id/education

www.dit-plp.go.id/bec

Telepon: (62) 21 52993000

Fax: (62) 21 52993111

E-mail: stow@worldbank.org



Dicetak pada kertas daur ulang



Rekomendasi untuk mendorong MBS

Memperkuat dan memberdayakan Sekretariat MBS di Kemdiknas melalui mekanisme dukungan dan kelompok kerja untuk:

1. Mengembangkan panduan komprehensif MBS yang menjelaskan langkah-langkah praktis yang harus diikuti agar pelaksanaan MBS dapat berhasil. Buku petunjuk ini harus dapat diakses secara

on-line, dengan sasaran sekolah-sekolah dan kelompok guru, kepala sekolah dan pengawas setempat.

2. Melengkapi buku panduan tersebut dengan sumber referensi yang dapat dipakai bersama, dengan mengumpulkan contoh-contoh praktik yang baik, peraturan setempat yang relevan, yang bisa menjadi sumber pengetahuan bersama.
3. Menetapkan serangkaian indikator yang disepakati untuk melacak pelaksanaan MBS, agar dapat memonitor berapa banyak sekolah dan kabupaten/kota yang melaksanakan MBS secara penuh atau sebagian.

4. Membuat definisi yang tegas mengenai Pendidikan Dasar Gratis untuk menghindari kerancuan yang terus terjadi mengenai biaya yang harus dibayar oleh para orangtua.
5. Memberikan dukungan untuk memperkuat kepala sekolah, guru dan komite sekolah, pejabat setempat, guru pra-jabatan untuk melaksanakan manajemen berbasis sekolah secara terpadu sehingga sekolah menjadi akuntabel dan mandiri, dengan demikian hasil pendidikan yang lebih baik dapat dicapai.

Informasi Praktik yang Baik di Situs Web

Banyak sumber online yang sangat mudah diakses, termasuk modul pelatihan dan cerita praktik yang baik di tingkat kelas, sekolah dan kabupaten

www.dit.plp.go.id/bec/gpin
atau www.wapikweb.org,
www.mgpbe.kemdiknas.go.id,
www.dbe-usaid.org
www.inovasi.pendidikan.net
www.pustakapendidik.org
www.jica.go.jp/project/indonesian/indonesia/0800042/index.html



Dialog Pendidikan Tematik: Lokakarya 'Memajukan MBS'

Tanggal 8 Agustus: lokakarya sehari ini didanai oleh program BEC-TF bagi para praktisi pendidikan dan perwakilan daerah dari berbagai program yang didukung mitra pembangunan. Lokakarya ini dimaksudkan untuk berbagi pelajaran yang bisa dipetik dari pelaksanaan MBS selama satu dasawarsa melalui berbagai proyek, serta membuat rekomendasi untuk pelaksanaan dan keberlangsungan MBS Indonesia di masa depan. Sumbangan pemikiran dari para wakil kabupaten/kota memperkaya diskusi yang dipimpin oleh Wakil Menteri, Bapak Fasli Jalal.

Lokakarya ini menghasilkan serangkaian masukan nyata bagi Kemdiknas, mitra pembangunan, dan pemerintah setempat untuk memajukan MBS. Beberapa rekomendasi utama sudah disebutkan diatas.

Bank Dunia, UNICEF, USAID, JICA, dan AusAID saling berbagi cerita keberhasilan, tantangan, pelajaran serta rekomendasi dari pengalaman pelaksanaan MBS melalui proyek-proyek mereka selama sepuluh tahun terakhir.



Foto: Sheila Town
Proses diskusi pada lokakarya MBS



Foto: Sheila Town

Pak Jiyono, UNICEF :

"Marilah ber-MBS ria!"

..... diikuti oleh Seminar Dialog Pendidikan Tematik

Rekomendasi dari lokakarya tanggal 8 Agustus dipresentasikan di forum seminar pada tanggal 9 Agustus yang dihadiri oleh pembuat kebijakan, akademisi dari universitas pendidikan, dan mitra pembangunan. Testimoni yang diberikan oleh perwakilan daerah Aceh, Gorontalo, Jawa, Papua, NTT, dan Riau memperkaya diskusi yang dipimpin oleh Wakil Menteri Pendidikan Nasional, Bapak Fasli Jalal dan Deputi Bidang Pendidikan dan Agama, Bapak Agus Sartono, dari Kementerian Koordinasi Kesejahteraan Sosial.

Dari Kemenag, Sekretaris Jenderal, Pak Bahrul, dan Direktur Jenderal, Pak Muhamad Ali, sangat

mendukung penerapan kebijakan mengenai MBS, dengan mengatakan "MBS bukan merupakan konsep baru. Ini mengenai otonomi sekolah, manajemen yang lebih baik, dengan peran yang semakin kuat bagi para kepala sekolah dan komite sekolah, dengan pendekatan yang holistik. Sudah saatnya kita mendukung kebijakan ini serta mempertimbangkan bagaimana kita seharusnya memperlakukan sekolah swasta dan sekolah pemerintah."

Beberapa kabupaten/kota saling berbagi cerita kemajuan mereka melalui dukungan dari proyek mitra pembangunan. Lihat halaman berikut.

Mengelola Sekolah Demi Hasil Capaian Siswa yang Lebih Baik di Gorontalo



Foto: Yogi Herdani
Abdul Waris, Kepala Dinas Pendidikan Boalemo

Provinsi Gorontalo mempunyai reputasi yang hebat dalam tatakelola pendidikan karena besarnya komitmen para pimpinan daerah terhadap dunia pendidikan. Kabupaten Gorontalo mempunyai 13 peraturan daerah yang berfokus pada peningkatan kualitas dan pelayanan pendidikan. Menurut Zubair Pomalinggo dari Kantor Dinas Pendidikan Gorontalo, "Kami pernah mendapatkan bantuan program dari UNICEF untuk dua kecamatan di Kabupaten Gorontalo dan sekarang pemda telah mendiseminasikan program tsb ke kecamatan lain di kabupaten Gorontalo. Kami mengusulkan agar pemerintah pusat mengakui hal ini, dan kalau bisa memberikan penghargaan kepada kabupaten yang sudah berhasil melaksanakan manajemen berbasis sekolah." Kabupaten Gorontalo dan Boalemo memperoleh bantuan dari UNICEF melalui program BE-SCSP didanai oleh Uni Eropa dari tahun 2007-2010.

Indikasi lebih lanjut mengenai betapa seriusnya Boalemo dalam pelaksanaan MBS terlihat dari upaya pemerintah daerah yang bekerja dengan tim pengawas dalam pengembangan alat monitoring untuk mengukur kemajuan pelaksanaan MBS. Para pengawas sendiri menentukan indikator monitoring untuk mengukur sejauh mana sebuah sekolah sudah melaksanakan manajemen berbasis sekolah; dan saat ini alat monitoring tersebut digunakan untuk melacak kemajuan sekolah yang mereka kunjungi. Mereka mulai menyaksikan peningkatan dalam hasil capaian siswa sejak usaha tersebut dilaksanakan: hasil ujian nasional pada tahun 2009 dan 2010 lebih baik daripada kabupaten lain.

Di luar Bantuan Proyek untuk SBM di Banten

"Di Kabupaten Pandeglang, Banten, pemerintah daerahnya telah berhasil mereplikasi model program REDIP (Regional Education Development and Improvement Program) yang dikembangkan oleh JICA yang bekerja sama dengan KEMDIKNAS dari tahun 1999 hingga 2008. Untuk Pandeglang sendiri, bantuan JICA berlangsung dari tahun 2009-2011. Pada tahun 2011, APBD Kabupaten mengalokasikan dana untuk peningkatan kualitas dan manajemen berbasis sekolah untuk semua SMP melalui pengelolaan oleh TP2K (Tim Pendidikan Pendidikan Kecamatan). Demikian juga dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi yang memberikan bantuan pendanaan untuk sejumlah madrasah. Ini menunjukkan adanya komitmen pemda untuk senantiasa meningkatkan mutu pendidikan di Pandeglang sebagai lanjutan dari bantuan mitra pembangunan."

Praktik Pembelajaran IPA : membantu pertumbuhan terumbu karang di SMP Darma Cahaya Purnama, Pandeglang.



Foto: Pelita/JICA

Partisipasi Masyarakat di Kupang

Maria Mbatu, guru di SD Satap Litneo yang mendapat bantuan dari AusAID



Foto: Yogi Herdani

"Dari pengalaman kami terkait dengan manajemen sekolah, sekolah kami sudah mulai melibatkan segenap pihak dengan sungguh-sungguh dalam perencanaan sekolah, termasuk masyarakat. Dari sisi keuangan, sekali lagi, kami ingin menekankan pentingnya transparansi. Sekolah kami sudah memberikan laporan keuangan ke orangtua murid dan masyarakat, bukan hanya dana BOS tetapi juga dana diluar BOS. Sekarang kami juga mempunyai orangtua relawan tanpa bayaran. Ini adalah bentuk partisipasi orangtua yang sangat kami banggakan. Kami juga menerima kontribusi dari masyarakat, dan kami sudah dapat menunjukkan pembukuan kami kepada mereka. Belum lama ini, masyarakat mengumpulkan dana untuk membeli perabot baru bagi sekolah, karena kami tunjukkan kepada mereka bahwa kami tidak mampu membeli perabot dengan dana BOS yang terbatas."